

DAFTAR PUSTAKA

- [1] INDONESIA, Kementerian Perhubungan Republik. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 26 Tahun 2016. *Jakarta (ID): Kementerian Perhubungan Republik Indonesia*, 2016.
- [2] Aguw, Randy. "Tanggung Jawab Syahbandar Dalam Keselamatan Pelayaran Ditinjau Dari UU Pelayaran No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran." *Lex Administratum* 1.1 (2013).
- [3] Hasugian, S., Wahyuni, A. I. S., Rahmawati, M., & Arleiny, A. (2017). Pemetaan Karakteristik Kecelakaan Kapal di Perairan Indonesia Berdasarkan Investigasi KNKT. *Warta Penelitian Perhubungan*, 29(2), 229-240.
- [4] Yoseph, Arya Dewanto, and Faturachman Danny. "Analisis Kecelakaan Transportasi Laut di Indonesia Tahun 2003-2013." *Prosiding Seminar Hasil Penelitian Semester Ganjil 2016/2017*. No. 1. Unsada, 2017.
- [5] International Maritime Organization (IMO) 2002, "Guidelines For Formal Safety Assesment (FSA) For Use In The IMO Rule-Making Process". London : Maritime Safety Commite
- [6] Saputra, Abadi Dwi. "Studi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di Indonesia Berdasarkan Data KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) dari Tahun 2007-2016." *Warta Penelitian Perhubungan* 29.2 (2017): 179-190.
- [7] Uut, Krismanto (2021) *ANALISIS KECELAKAAN KAPAL BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH PELAYARAN TAHUN 2015 – 2019 DITINJAU DARI FORMAL SAFETY ASSESSEMENT (FSA)*.
- [8] Rekapitulasi Putusan Mahkamah Pelayaran Tahun 2020 - 2023
- [9] Pawlowski, Maciej. "Critical Review of Subdivision Regulations in the SOLAS Convention." *Journal of Ship Production and Design* 33.04 (2017): 342-356.
- [10] Mattson, Gini. "MARPOL 73/78 and Annex I: an assessment of its effectiveness." *Journal of International Wildlife Law and Policy* 9.2 (2006): 175-194.
- [11] Takaki, M., & Takaishi, Y. (1993). Development of expression for estimating bow freeboard and assessment of the 1966 Load Line Convention. *Journal of the Society of Naval Architects of Japan*, 1993(174), 171-179.
- [12] Collreg 1972
- [14] ILO No. 147 Tahun 1976
- [15] ILO Convention No.185 Tahun 2009
- [16] Shanty, Shanty, and Puji Astuti Amalia. "Analisis Faktor Dominan Penyebab Kecelakaan Kapal Di Perairan Laut Indonesia." *Jurnal Maritim* 12.2 (2022): 24-28.
- [17] Erwin, Rahmi. "Tanggung Jawab Negara Untuk Mencegah Terjadinya Kecelakaan Kapal Transportasi Laut Menurut Hukum Internasional Dan Hukum Nasional." *SUPREMASI: Jurnal Hukum* 4.2 (2022): 177-199.
- [18] Saputra, Abadi Dwi. "Studi kecelakaan kapal di Indonesia dari tahun 2003-2019 berdasarkan data investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi." *Warta Penelitian Perhubungan* 33.2 (2021): 87-94.

- [19] Hasugian, S., Wahyuni, A. I. S., Rahmawati, M., & Arleiny, A. (2017). Pemetaan Karakteristik Kecelakaan Kapal di Perairan Indonesia Berdasarkan Investigasi KNKT. *Warta Penelitian Perhubungan*, 29(2), 229-240.
- [20] Malisan, Johny. "Analisis Kecenderungan Kecelakaan Kapal di Indonesia." *Warta Penelitian Perhubungan* 22.1 (2010): 72-83.
- [21] Kendek, M., Iskandar, I., Satria, I. D., & Bayuntara, A. W. (2022). Studi Kasus Analisis Hasil Investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (Knkt) Terhadap Penyebab Tubrukan Kapal Di Perairan Indonesia. *JPB: Jurnal Patria Bahari*, 2(2).
- [22] Arsy, M. F. (2021). Kebijakan maritim dalam menunjang keselamatan dan keamanan transportasi laut. *Riset Sains dan Teknologi Kelautan*, 62-65.
- [23] Yahya, S. (2022). IDENTIFIKASI RISIKO KRITIS KECELAKAAN KAPAL TENGGELAM (Studi kasus: kecelakaan di perairan laut Indonesia dan kapal berbendera Indonesia). In *Seminar Nasional Hasil Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat (SNP2M)* (Vol. 7, No. 1, pp. 34-39).
- [24] Arletiko, T. (2017). Penegakan Hukum di Perairan Indonesia oleh Badan Keamanan Laut Menurut UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. *Lex Et Societatis*, 5(10).
- [25] EKAWATI, N. N. (2012). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU KECELAKAAN LAUT (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).
- [26] Nurul, H. (2021). TABRAKAN KAPAL DI LAUT DAN PENCEGAHANNYA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- [27] Kadarisman, M. (2017). Kebijakan keselamatan dan keamanan maritim dalam menunjang sistem transportasi laut. *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik (JMTRANSLOG)*, 4(2), 177-192.
- [28] Saragih, S. A. (2018). TANGGUNG JAWAB SYAHBANDAR DALAM MENCEGAH KECELAKAAN KAPAL LAUT ANTAR PULAU (Doctoral dissertation, UAJY).
- [29] Faridah, H. F. H., & Fajarwati, R. A. (2022). Pengawasan Transportasi Laut Demi Mewujudkan Keselamatan Dan Keamanan Pelayaran Nasional. *Jurnal Keamanan Nasional*, 8(2), 396-407.
- [30] Tampomalu, M. (2021). PENEGAKAN HUKUM KESELAMATAN DI LAUT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN. *Lex Administratum*, 9(3).